

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAMUJU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. SAHARI BULAN ,SH
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Hj.SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si
Jabatan : BUPATI MAMUJU
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr.Hj.SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

Pihak Pertama,

Hj. SAHARI BULAN ,SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi Aktif	50 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pertumbuhan usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	3 %
3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM berbahan baku lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	7 %
4	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif ,Efesien dan berorientasi pada layanan prima	Predikat AKIP	BB

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.782.964.113,-	APBD
2	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	26.951.700,00	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	32.725.600,00	APBD
4	Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian	15.322.700,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	52.249.000,00	APBD
6	Program Pengembangan UMKM	1.040.684.600,00	APBD
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	409.484.000,00	APBD
8	Program pengendalian Izin Usaha Industri	14.463.000,00	APBD
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	25.053.000,00	APBD
	Jumlah Total	4.399.897.713.000,00	

Mamuju, 20 Januari 2025

Bupati Mamuju,

Dr.Hj. SITTU SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si

Kepala Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian

Hj. SAHARI BULAN, SH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAMUJU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY ISWADI,SE

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. SAHARI BULAN ,SH

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Hj. SAHARI BULAN ,SH

Pihak Pertama,

DEDY ISWADI,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN
SEKRETARIS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah secara akuntabel	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Program Kegiatan :

I.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Rp. 2.782.964.113
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.643.600
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.536.924.085
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 95.005.500
4. Administrasi barang milik daerah perangkat daerah	Rp. 6.150.000
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 96.637.928
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 41.603.000
Jumlah	Rp. 2.782.964.113

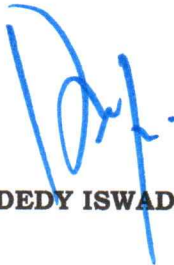
Mamuju, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi,UKM dan
Perindustrian,



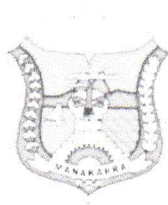
Hj. SAHARI BULAN ,SH

Sekretaris,



DEDY ISWADI,SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAMUJU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RIRIN TRI JULIANTI DJ, S.IP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. SAHARI BULAN ,SH

Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Hj. SAHARI BULAN ,SH

Pihak Pertama,

RIRIN TRI JULIANTI DJ, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

NO	SASARAN PROGRAM / KEG / SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	10 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian	10 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kab.	10%

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI **Rp. 26.951.700,00**

Pemeriksaan dan pengawasan koperasi ,koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota

1. Pelaksanaan Proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota
Rp. 26.951.700,00

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN **Rp. 15.322.700,00**

Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ kota

- 1.Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
Rp. 15.322.700,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI **Rp. 32.725.600,00**

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota.

1. Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas,Nilai tambah,Akses pasar .Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan ,Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota
Rp. 32.725.600,00

Mamuju, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi,UKM dan
Perindustrian,



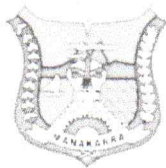
Hj. SAHARI BULAN ,SH

Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi,



RIRIN TRI JULIANTI DJ, S.IP

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAMUJU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NUR HIDAYATI SUKIRNO,SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. SAHARI BULAN ,SH
Jabatan : KEPALA DINAS
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Hj. SAHARI BULAN ,SH

Pihak Pertama,

NUR HIDAYATI SUKIRNO,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

NO	SASARAN PROGRAM/KEG/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	3 %
2	Meningkatnya pengembangan usaha mikro dan kecil	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	5 %

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH ,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Rp. 52.249.000,00

Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan ,Kemitraan, Kemudahan perizinzn ,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan

1. Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro Rp. 52.249.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Rp. 1.040.684.600,00

Pengembangan usaha mikro dengan Oerintasi Peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil

1. Produksi dan pengolahan, Pemasaran ,Sumber daya Manusia serta Desain dan teknologi

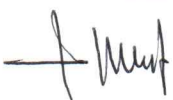
Rp. 1.040.684.600,00

Mamuju, 20 Januari 2025

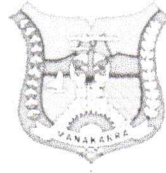
Kepala Dinas Koperasi,UKM dan
Perindustrian


Hj. SAHARI BULAN, SH

Kabid, Pemberdayaan Usaha
Mikro,


NUR HIDAYATI SUKIRNO,SE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAMUJU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAMLIAH NURDIN,SE**
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian,
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. SAHARI BULAN ,SH**
Jabatan : KEPALA DINAS
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Hj. SAHARI BULAN ,SH

Pihak Pertama,

RAMLIAH NURDIN,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEG/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas usaha dan kompetensi SDM Industri	Persentase IKM Berbahan baku local yang mendapatkan pembinaan usaha ditetapkan dalam RPIK	3 ,5%
2	Meningkatnya pengendalian Izin Usaha Industri berbasis Resiko	Persentase Jumlah hasil emantauan Jumlah Izin Us Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkaitaha Industri (IUI)	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan informasi Industri yang menjadi kewenangan Kabupaten	Tingkat ketersediaan Informasi Industri	100%

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri **Rp.409.484.000,00**

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

1. Koordinasi ,Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Rp. 389.629.000,00
2. Koordinasi ,Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya industry

Rp. 19.855.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAH INDUSTRI KABUPATEN/KOTA **Rp.14.463.000,00**

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) ,Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) ,Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Fasilitas pemenuhan Komite Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam system Informasi Industri Nasional (SIiNas) yang Terintegrasi dengan system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dengan Sistem ZOnline Single Submission Risk Base Apporch (OSS RBA)

Rp.14.463.000,00

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional **Rp.25.053.000,00**

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Fasilitas Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIiNas)

Mamuju, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS



Hj. SAHARI BULAN, SH

KABID PERINDUSTRIAN



RAMLIAH NURDIN, SE